

**KOMUNIKASI POLITIK TENTANG KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN DALAM DAKWAH BAITUL MUSLIMIN DPC
PDI-P GUNUNG KIDUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU SOSIAL ISLAM**

OLEH :

**LIDIASTUTI GULO
04210058**

**KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi saudara I Lidiastuti Gulo

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengarahkan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lidiastuti Gulo

NIM : 04210058

Judul Skripsi : Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah, Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 Desember 2009

Pembimbing I

Drs. Hamdan Daulay
NIP. 150269255

Pembimbing II

Andayani, SIP, MSW
NIP. 150292260

ABSTRAK

Komunikasi politik sebagaimana yang didefinisikan pencetusnya, Harold D. Lasswell (1902-1978) merupakan disiplin pengetahuan untuk mengetahui siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Dari pengertian padat dan sederhana ini, komunikasi politik kemudian berkembang sebagai sebuah pisau analisa untuk memecahkan masalah sosial yang berhubungan dengan kehidupan politik. Demikian halnya di Indonesia -sebagai sebuah Negara (*nation*) dan bangsa (*state*)- yang terdiri dari homogenitas masyarakatnya, komunikasi politik telah banyak digunakan sebagai *basic theory* penelitian sosial.

Homogenitas masyarakat Indonesia pada akhirnya juga mempengaruhi kehidupan politik. Tercatat sejak Negara ini diproklamakan, berdirilah partai-politik (parpol) dengan memegang ideologi masing-masing. Di satu sisi, terdapat partai yang secara konsisiten mengusung ideologi nasionalisme, sementara tidak sedikit partai yang menggunakan agama sebagai azas dasarnya. Diakui atau tidak, kerangka ideologi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan suara dalam kontestasi politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai nasionalis yang lahir tahun 1999 sebagai parpol yang didedikasikan sebagai tempat kaum nasionalis. Pegangan kuat atas ideologi nasionalisme disatu sisi dapat menjadi nilai lebih partai, sementara disisi lain bisa menjadi boomerang ketika dikaitkan dengan tradisi politik Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh fanatisme keagamaan. Tradisi politik tersebut ditambah lagi dengan realitas bahwa masyarakat Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim.

Menyadari fanatisme politik tersebut, PDI-P kemudian menggelar pertemuan akbar yang kemudian berhasil mendeklarasikan organisasi kemasyarakatan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2007. Kendati mendapat pertentangan dari sebagian kecil internal PDI-P, BAMUSI melaju mulus sebagai ormas yang konsisten mempublikasikan gagasan politik PDI-P utamanya yang berkaitan dengan nalar keagamaan, seperti halnya tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam.

BAMUSI Kabupaten Gunung Kidul sebagai organisasi di tingkat daerah, sangat berperan aktif dengan melakukan berbagai macam propaganda, pendidikan politik serta pelatihan pada garis kebijakan dari BAMUSI Pusat. Hal ini kemudian menarik minat penyusun untuk mengetahui lebih jauh mengenai aktifitas, media, saluran politik serta pengaruhnya bagi masyarakat Gunung Kidul. Pada penelitian ini penyusun menyederhanakan tema penelitian pada isu kepemimpinan perempuan, hal itu didasarkan pada fakta bahwa kepemimpinan perempuan masih menjadi isu yang kontroversial. Selain alasan tersebut, dalam tradisi masyarakat Jawa yang mana laki-laki lebih dominan, tentu sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam aktifitas BAMUSI Gunung Kidul yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama tentang propaganda kepemimpinan perempuan.





DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/248/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**KOMUNIKASI POLITIK TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUNAN
DALAM DAKWAH BAITUL MUSLIMIN DPC PDIP GUNUNG KIDUL**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Lidiastuti Gulo
NIM : 04210058
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 05 Januari 2010
Nilai Munaqasyah : **B+**

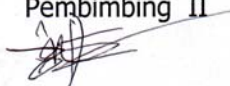
dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing I


Drs. Hamdan Daulay, M.Si.
NIP.19661709 199403 1 004

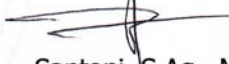
Pembimbing II


Andayani, SIP., MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

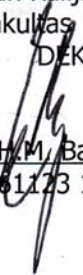
Penguji I


Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP.19671006 199403 1 003

Penguji II


Saptoni, S.Ag., MA
NIP. 19730221 199903 1 002

Yogyakarta, 22 Februari 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
DEKAN


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP . 19561123 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahminirrahim.

Puji serta syukur penyusun panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta pemberi perlindungan serta keselamatan bagi kita semua. Shalawat dan dalam terlimpah pada junjunan Nabi Muhammad, Rasul pemberi rahmat dan syafaat nanti di *yaumul qiyamah*.

Pada kesempatan ini, penyusun hendak menghaturkan ucapan tulus terima kasih dan penghargaan yang amat luar biasa, kepada mereka yang telah membantu, berpartisipasi dan memotivasi penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi sebagai pra-syarat predikat sarjana. Mereka yang termaksud diantaranya :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, atas dasar kebaikannya skripsi ini bisa dirampungkan.
3. Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) UIN Sunan Kalijaga atas kemudahan dan kelonggaran birokrasi yang dipercayakan.
4. Ibu Andayani, SIP., MSW selaku pembimbing I dan Drs. Hamdan Daulay, M.Si selaku pembimbingII yang memberikan masukan, kritik.
5. Semua pihak terutama keluarga, suami dan teman-teman yang tanpa mereka penyusun yakin tak bisa untuk berbuat lebih.

Tentu masih banyak pihak yang tidak bisa disebutkan persatunya, yang secara langsung maupun tidak, telah menjadikan karya kecil ini bisa tampil baik diatas segala kekurangannya. Harapan penyusun, semoga skripsi ini bias

bermanfaat bagi pembaca budiman, serta civitas akademika Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, penyusun membuka pintu lebar kepada pembaca untuk mendiskusikan, mengkritik serta memberikan masukan atas karya akhir ini.

Jazakumullahu khoiron katsiron

Papringan, 20 Juli 2010

Penyusun,

LIDIASTUTI GULO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	5
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Kerangka Teoritik.....	13
H. Metode Penelitian.....	24
BAB II : SISTEM ORGANISASI PARTAI DEMOKRASI	
INDONESIA PERJUANGAN, BAITUL MUSLIMIN DAN	
BAITUL MUSLIMIN GUNUNG KIDUL	
A. Profil PDI-Perjuangan.....	29
B. Profil Baitul Muslimin Indonesia.....	33
C. Profil Baitul Muslimin Gunung Kidul.....	39

	D. Komunikasi politik Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul tentang Kepemimpinan Perempuan.....	45
BAB III	: CITRA KEISLAMAN DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM DAKWAH BAITUL MUSLIMIN SEBAGAI KOMUNIKASI POLITIK PDI PERJUANGAN	
	A. Komunikasi Politik PDI-Perjuangan.....	52
	B. Bamusi dan Ideologi Patriarki.....	71
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran	77
	C. Penutup.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul”. Agar tidak terjadi kerancuan mengenai judul tersebut, berikut ini penjelasan mengenai istilah yang dipergunakan dalam judul.

1. Komunikasi politik

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek dan problematikanya. Karena itu, kajian komunikasi politik cenderung parsial dengan berpatokan pada model analisa tertentu. Misalnya Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.¹ Pandangan ini jika dianalisis lebih menekankan pendekatan konflik, sehingga jika merujuk pandangan Dan Nimmo ini maka komunikasi politik merupakan jenis komunikasi yang didalamnya mengatur kepentingan antar kelompok dalam pranata sosial.

¹ Lihat Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*, penerjemah Tjun Surjaman, Cetakan ke-2 (Bandung: Goodyear Publishing Co. bekerjasama dengan Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 124.

Pendapat yang lebih komprehensif dikemukakan Sumarno yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.²

Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan komunikasi politik berdasarkan pandangan politik (klasik, kekuasaan, kelembagaan, fungsionalis, atau konflik) yang kita gunakan/yakini. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan komunikasi politik yaitu proses komunikasi yang menyangkut interaksi kelompok politik sebagai komunikator dan masyarakat, dalam rangka proses agregasi politik, advokasi maupun rekrutmen massa baik menggunakan saluran politik formal maupun organisasi massa yang didalamnya menyimpan kepentingan individual maupun kelompok tertentu.

2. Dakwah

Dakwah diartikan sebagai ajakan kepada sesuatu yang baik dan pencegahan kepada sesuatu yang buruk.³ Secara teoritis, dakwah dibedakan menjadi dua yakni dakwah *bil-lisan* biasanya berupa kata-kata

² Sumarno AP, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 3

³ Lihat Faisal Ismail dalam kata pengantar Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: LESFI, 2001), hal. vi.

dan *bil-hal* yang berwujud aksi dan tindakan nyata.⁴ Setiap agama tentunya mempunyai konsep dakwah untuk menyebarkan ajarannya masing-masing. Dakwah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dakwah yang menyeru kepada ajaran dan nilai-nilai Islam.

3. Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau pengikut-pengikutnya sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut.⁵ Para pemimpin merupakan manusia-manusia yang jumlahnya sedikit, namun perannya dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Kepemimpinann pada hakekatnya tidak terbatas pada klasifikasi tertentu seperti jenis kelamin, suku, etnik serta identitas primordialistik lainnya, akan tetapi pada kenyataannya seringkali kepemimpinan dipegang oleh kelas sosial tertentu, seperti kaum laki-laki. Dua hipotesis yang dikembangkan tentang kepemimpinan, yaitu ; (1) kualitas pemimpin dan kepemimpinan yang tergantung kepada situasi kelompok, dan (2), kualitas individu dalam mengatasi situasi sesaat merupakan hasil kepemimpinan terdahulu yang berhasil dalam mengatasi situasi yang sama.⁶ Wacana kepemimpinan perempuan kepemimpinan perempuan dalam skripsi ini dimaksudkan sebagai cita-cita politik secara

⁴ *Ibid.*, hal. vi

⁵ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, edisi ke-10, terj. Benyamin Molan (Jakarta : PT. Indeks, 2003), hal. 432

⁶ Hocking & Boggardus, dikutip dari Stephen P. Robbin....*ibid.*

subyektif dari Baitul Muslimin sebagai *patron client* dari PDI-P untuk menjadikan tokoh perempuan mereka sebagai pemegang kursi kepemimpinan.

Untuk menggapai cita-cita politik tersebut maka dikonstruksikan sekian bentuk komunikasi politik yang dilabelisasi dengan dakwah Islam oleh Baitul Muslimin sebagai organisasi sayap PDI-P yang bergerak dalam bidang sosial-keagamaan.

4. Baitul Muslimin PDI-P

Terdapat banyak sekali komunitas yang menamai dirinya dengan Baitul Muslimin. Namun dalam kajian ini Baitul Muslimin yang dimaksud adalah Baitul Muslimin bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan merupakan organisasi sayap dari partai tersebut. Baitul Muslimin PDI-P yang hendak diteliti dalam skripsi ini terbatas pada Baitul Muslimin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kab. Gunung Kidul, Yogyakarta. Historisitas Baitul Muslimin ini didirikan pada 29 Maret 2008 dengan kantor kesekretariatan di Jalan Ki Ageng Giring, Siraman, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Dari uraian singkat mengenai istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan dalam Dakwah Baitul Muslimin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Gunung Kidul yang dimaksud dalam skripsi ini adalah

aktivitas dakwah yang berdimensi politik terkait kepemimpinan perempuan oleh Baitul Muslimin PDI-P DPC Gunung Kidul.

B. Latar Belakang

Tradisi politik begitu kental dalam masyarakat Islam. Dalam sejarahnya agama Islam tidak pernah lepas dari kehidupan politik. Pada zaman kerajaan ketika masuknya Islam di Indonesia dakwah Islam terbilang sukses hingga lahirlah beberapa kerajaan besar bercorak Islam seperti Demak dan Samudra Pasai. Pada periode selanjutnya tokoh-tokoh Islam dengan organisasi yang dilandasi semangat ajaran Islam seperti Sarekat Islam (SI) berkontribusi besar dalam proses kebangkitan nasional. Bahkan setelah Indonesia merdeka, politik Islam tetap menunjukkan kiprahnya di kancah perpolitikan nasional melalui partai politik berazaskan Islam. Hal ini menunjukkan pengaruh Islam yang luar biasa pada proses politik di negeri ini.

Partai politik berazaskan Islam pertama yang hidup di alam Indonesia pasca merdeka dan menjadi partai tunggal umat Islam adalah Masyumi.⁷ Partai ini dahulu mampu menjadi partai pemersatu semua golongan muslim. Namun kemudian partai ini menyurut dan terpecah. Pada masa orde baru, Indonesia menganut sistem politik tiga partai (fusi partai). Pada masa ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya partai bernafaskan agama, yakni Islam.

⁷ SKI Fakultas Adab UIN Yogyakarta, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2006), hal. 263.

Pasca reformasi partai politik Islam menjamur di Indonesia sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah untuk menggunakan sistem multi-partai. Pada awal diberlakukannya sistem multi-partai pasca reformasi muncul beberapa partai Islam meskipun akhirnya hanya 8 partai saja yang lolos sistem *electoral threshold* dan berhak ikut Pemilu 1999.⁸ Kemudian pada pemilu tahun 2009, terdapat 6 partai berasaskan Islam yakni: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), PKNU, dan Partai Matahari Bangsa (PMB) dan beberapa partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai asas tapi berbasis dukungan umat Islam; seperti Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).⁹

Dalam realitas politik kontemporer, tidak hanya parpol primordial yang memang berhaluan Islam saja yang mencoba menggalang suara umat Muslim. Partai politik yang tidak berlabel Islam-pun berlomba menarik perhatian pemilih Muslim dengan menggunakan simbol-simbol agama. Salah satunya dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan membentuk organisasi sayap bernama Baitul Muslimin. Hal ini bisa dimengerti sebab sekitar 90 % warga Negara Indonesia beragama Islam.¹⁰ Sebagai kaum mayoritas ini tentu sangat signifikan untuk menentukan kemenangan dalam pemilu.

⁸ *Ibid.*, hal.263.

⁹ Tabloid Suara Islam, *Poros Islam Suatu Keniscayaan*, edisi 49, Tanggal 1 - 14 Agustus 2008.

¹⁰ Tabloid Suara Islam, *Poros Islam....., ibid.*

Organ sayap PDI-P ini menggunakan pilihan nama khas Islam yang secara bahasa berarti Rumah (*Baitul*) umat Muslim (*Muslimin*) dan mengambil bentuk sebagai organ khusus bagi umat Islam. Pemilihan ini menampakkan keinginan untuk mengakomodir kebutuhan akan simbol-simbol religius dari umat Islam. Artinya nilai-nilai dan makna ke-Islam-an akan mendapatkan tempat dalam Baitul Muslimin, yang secara otomatis berarti terjadi aktivitas dakwah didalamnya. Karenanya, secara simplifikatif pendirian Baitul Muslimin ini hendak mensinergiskan antara nilai ke-Islam-an dengan kepentingan partai politik (PDI-P).

Sebagai alat komunikasi politik, Baitul Muslimin memainkan peran penting dalam proses pembentukan opini umum. Aktivitas komunikasi politik dan *branding image* yang bertujuan agar PDI-P laku di pasaran konstituen Muslim. Dapat dikatakan bahwa segala aktivitas Baitul Muslimin akan disesuaikan dengan kepentingan baik idealis maupun pragmatis partai PDI-P sehingga aktivitas tersebut diproduksi dan diedarkan dalam komunitas tersebut merupakan saluran advokasi dengan makna yang telah dipilih dan di-*setting*. Dengan kata lain, politik bisa juga disebut sebagai kompetisi dan pertarungan atas makna simbol-simbol dan penguasaan atas lembaga yang menentukan dan mengartikulasikan nilai-nilai sosial.¹¹

Di balik strategi meraih dan menggiurkannya kuantitas umat muslim sebagai *konstituen* pemilu, Islam memiliki seperangkat wacana mengenai

¹¹ Dale F.Eikelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, penerjemah Endi Haryono dan Rahmi Yunita, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hal. 9.

norma atau pedoman bagi pemerintahan yang ideal, meskipun norma tersebut multi-tafsir dan memiliki banyak versi yang kesemuanya meng-klaim dan mendasarkan diri pada al-Qur'an dan atau al-Hadist. Isu politik ini misalnya tentang kepemimpinan perempuan yang kontroversial. Beberapa versi menyatakan bahwa pemimpin perempuan tidak “direstui” dalam Islam, versi lain mengizinkan perempuan untuk memimpin. Permasalahan ini menjadi fokus kajian penulis mengingat sangat erat kaitannya dengan eksistensi politik yang dibangun PDI-P melalui Baitul Muslimin.

Persoalan kepemimpinan perempuan ini tentu penting dikelola oleh PDI-P yang dalam beberapa putaran pemilu menjagokan perempuan sebagai kandidat pemimpin Negara. PDI-P adalah partai nasionalis bahkan mendapat *stereo-type* sekuler, dalam artian bukan partai primordial berbasis agama. Mengingat situasi seperti yang dipaparkan di atas maka partai *moncong putih* ini memerlukan formulasi komunikasi politik khusus untuk bisa mendapatkan simpati dari konstituen Muslim. PDI-P hendak menunjukkan bahwa sekuler bukan berarti tidak peduli (mengabaikan) persoalan dan nilai-nilai agama dengan menggunakan Baitul Muslimin sebagai lembaga (alat) komunikasinya.

Kepengurusan organ sayap ini dibentuk mengikuti pola struktur partai, dalam arti terdapat Baitul Muslimin tingkat Nasional, Daerah maupun Cabang. Struktur Kepengurusan Baitul Muslimin DPC Gunung Kidul merupakan kepengurusan pertama yang dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan kepengurusan yang paling eksis melakukan kegiatan. Hal ini menjadi alasan penulis untuk memilih Baitul Muslimin

Gunung Kidul sebagai obyek penelitian. Dari latar belakang ini penulis menilai cukup menarik untuk melihat bagaimana komunikasi politik yang dilakukan sebuah partai politik “sekuler” untuk mencoba menangkap dan memperbesar peluang pendapatan suara dengan citra ke-Islam-an utamanya dalam masalah kepemimpinan perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah komunikasi politik mengenai isu kepemimpinan perempuan dalam dakwah yang dibangun oleh Baitul Muslimin PDI-P DPC Gunung Kidul

D. Tujuan Penelitian

Memahami komunikasi politik dalam isu kepemimpinan perempuan yang dilakukan PDI-P melalui dakwah Baitul Muslimin

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemilihan subyek dan obyek penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai komunikasi politik dan pembentukan opini umum baik bagi penulis maupun pembacanya. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan penyiaran Islam melalui media politik.

F. Kajian Pustaka

Sebagai kajian pustaka, berikut beberapa referensi mengenai penelitian yang relevan dengan pokok kajian penelitian skripsi ini.

1. Skripsi berjudul “Media Komunikasi Pada Partai Politik” tahun 2007, karya Daud Muslim, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga fakultas Dakwah jurusan KPI. Skripsi ini mengupas media komunikasi dan teknik persuasi apa saja yang digunakan PKS DIY untuk berkomunikasi pada khalayaknya. Hasil penelitian skripsi ini secara garis besar memperlihatkan bahwa PKS DIY menggunakan berbagai media komunikasi politik sekaligus. Diantaranya adalah saluran massa seperti kampanye akbar, spanduk, televisi radio dan internet. Saluran interpersonal seperti kegiatan “anjangsono” dan saluran organisasi seperti komunitas atau organ sayap bentukan partai. Sementara teknik-teknik persuasi yang digunakan meliputi teknik propaganda, retorika, dan periklanan. Dalam skripsi ini juga dikatakan bahwa meskipun era globalisasi telah menjejali manusia dengan begitu banyak teknologi komunikasi, namun media inter-persoanal yang dikenal juga dengan istilah “anjangsono” menjadi andalan bagi komunikasi politik PKS DIY. Anjangsono menjadi andalan karena partai ini memiliki kader-kader dengan loyalitas dan integritas yang tinggi..
2. Skripsi berjudul “Pola Komunikasi Politik PKS Kota Salatiga Pada Pemilu Legislatif 2004”, tahun 2005, karya Saiful Mashud, mahasiswa

KPI fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Penelitian ini melihat bagaimana pola komunikasi yang dibangun PKS Kota Salatiga untuk mencapai target perjuangan politik pada pemilu legislatif 2004 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *etnometodologi*.¹² Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik PKS Kota Salatiga pada pemilu legeslatif 2004 difokuskan pada pembangunan citra partai, bukan figur yang dicalonkan. Hal ini terlihat dari hasil pemilu legislatif yang digelar pada tanggal 5 April 2004 yang menunjukkan konstituen PKS lebih banyak mencoblos tanda gambar daripada nama calon. Lebih jauh dalam skripsi ini dinyatakan bahwa faktor penting keberhasilan PKS kota Salatiga adalah tingkat militansi, kerja keras serta keikhlasan para kader partai yang memfungsikan dirinya sebagai komunikator politik. Partai ini secara berkala dan teratur melakukan pembasisan (*recruitment*) dengan sistem pembekalan tertentu berdasarkan ideologi partai. Pengkaderan berjalan hierarkhis dan berjenjang. Hal ini membuat PKS diidentikan dengan partai kader; yaitu partai yang mengutamakan kualitas, disiplin dan kerja para anggota kader.

3 Tesis berjudul “Strategi Komunikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2004: Evaluasi Strategi Komunikasi Politik Partai PKB Kab. Bekasi Tentang

¹² Etnometodologi mempelajari prosedur (metodologi) yang digunakan oleh seseorang (etnik), lembaga masyarakat, dan lain sebagainya dalam upayanya untuk menangani dunia dengan cara yang bermakna. Lihat Dan Nimmo, *Khalayak dan Efek*, penerjemah Tjun Surjaman, cetakan ke-3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 242.

Isu Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Legislatif”, tahun 2005, karya Idham Cholik, mahasiswa S2 FISIP Universitas Indonesia. Tesis ini ingin melihat apakah PKB Bekasi mampu memformulasikan dan mengimplementasikan strategi komunikasi politik yang persuasif tentang isu keterwakilan perempuan. Hasil dari penelitian itu antara lain bahwa PKB menggunakan *professional appointee* dan kemudian *political appointee* sebagai dasar penetapan caleg perempuan. Semua caleg perempuan PKB berasal dari komunitas NU dan didominasi dari kalangan guru/*ustadzah*. Kampanye caleg perempuan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Bekasi, bahkan sebenarnya sebelum masa kampanye tiba caleg perempuan telah melakukan *hidden campaign* melalui sarana silaturahmi dan kunjungan. Selama kampanye, caleg perempuan menghadapi kendala yang sangat mempengaruhi yaitu minimnya pendanaan yang dimilikinya, selain itu juga mereka melakukan kerja sama dengan badan otonom NU seperti Fatayat NU, IPNU, dll. Sangat disayangkan kerja sama itu sangat eksklusif, hanya di lingkungan NU saja. Media kampanye hanya menggunakan media cetakan saja seperti stiker dan poster. Sementara itu badan otonom Pergerakan Perempuan PKB tidak berjalan dalam mensosialisasikan kesetaraan gender dalam politik, padahal sebenarnya badan tersebut sangat potensial.

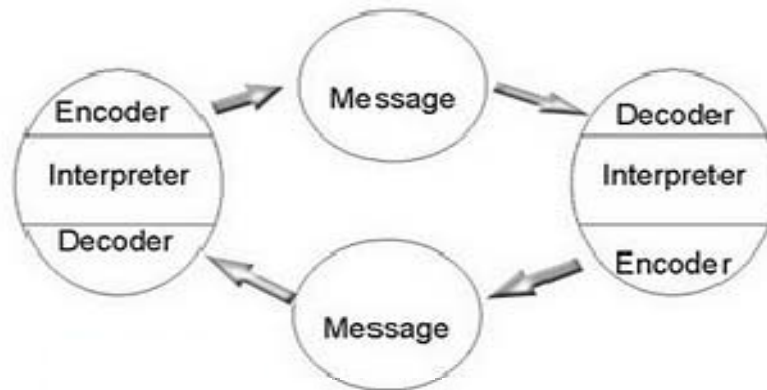
Perbedaan skripsi ini dengan beberapa penelitian di atas terutama adalah subyek penelitian dan kontennya.¹³ Subyek penelitian skripsi ini adalah Baitul Muslimin bentukan PDI-P DPC Gunung Kidul, berbeda dengan tiga skripsi di atas yang mengambil PKS dan PKB sebagai subyek. Dari sisi konten, kelebihan penelitian ini pada obyek; jika pada penelitian sebelumnya hanya terpaku pada partai berlabel Islam, tetapi pada penelitian ini melihat partai sekuler yang mencoba mengkontruksi nilai Islam melalui organ sayapnya.

G. Kerangka Teoritik

Penelitian mengenai komunikasi politik tentu membutuhkan kerangka teori yang kuat. Untuk menunjang kebutuhan atas teori tersebut, penyusun mengawalinya dengan membahas komunikasi secara umum. Menurut Wilbur Schramm Komunikasi setidaknya membutuhkan 3 unsur, yaitu Sumber (*Source*), Pesan (*Message*) verbal maupun non-verbal, dan sasaran (*Destination*).¹⁴ Hubungan ketiga faktor komunikasi tersebut dapat dilihat dari bagan yang dibuat oleh Schramm sebagaimana di bawah ini:

¹³ Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau dikenal dengan istilah 'informan' yaitu orang atau lembaga yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hal. 136.

¹⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*, penerjemah Tjun Surjaman, Cetakan ke-2 (Bandung: Goodyear Publishing Co. bekerjasama dengan Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 132



Dalam ilmu komunikasi tindakan menghasilkan pesan (misalnya, berbicara atau menulis) diartikan sebagai enkoding (*encoding*) misalnya dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau ke atas selembar kertas berarti kita sedang menjelmakan gagasan-gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Sementara tindakan menerima pesan (misalnya, mendengarkan atau membaca) sebagai dekoding (*decoding*) yakni tindakan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata sebagai kode di atas menjadi gagasan, kejadian inilah yang dikatakan sebagai proses komunikasi. Proses penyampaian dan penerimaan komunikasi tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media, bahasa, kial (*gesture*), isyarat, gambar, warna, dan sebagainya. Denotatif yaitu, kata-kata yang memiliki arti sebagaimana tercantum dalam kamus

atau sebenarnya (*dictionary meaning*) Konotatif yaitu, kata-kata yang memiliki arti emosional atau mengandung penilaian tertentu / kiasan (*emotional or evaluate meaning*)¹⁵

2. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama dipakai karena relatif jauh atau jumlahnya banyak. Sarana itu, surat, telepon, fax, koran, majalah, radio, TV, film, e-mail, internet, dan lain-lain karena komunikasi sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh.¹⁶

Pada penelitian ini, terma komunikasi akan lebih difokuskan pada komunikasi politik. Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.¹⁷ Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell¹⁸: siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang sangat

¹⁵ Onong Uchjana E, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 63

¹⁶ *Ibid.*, hal. 64

¹⁷ Lihat dalam Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, cetakan ke-1 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), hal. 9.

¹⁸ *Ibid.* hal. 13

“berbau” mekanistik, dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, penghampiran ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut.

Dan Nimmo melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara¹⁹. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.

Pendapat ini diperkuat oleh Almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.²⁰

Menilik deskripsi di atas, dapat diambil simpulan bahwa komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatif). Hal ini bisa diperkuat

¹⁹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media.... Ibid.* hal. 12

²⁰ Lihat dalam Anwar Arifin, *Komunikasi Politik...ibid.*hal. 9

oleh pendapat Sumarno²¹ yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.

Fungsi Komunikasi Politik

Menurut Sumarno fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. *Pertama*, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.²²

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

²¹ Sumarno AP, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, (Bandung: Citraaditya Bakti, 1993), hal. 3

²² *Ibid.* hal. 28

1. Partai Politik dan Organisasi Massa sebagai Encoder

Menurut Carl.J Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil yang bertujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya sehingga penguasaan tersebut bermanfaat bagi anggota partainya baik manfaat secara ideal maupun manfaat secara material.²³

Beberapa partai politik di Indonesia mengorganisir massanya berdasarkan faktor primordial yang salah satunya adalah faktor agama. Politik dan agama khususnya di Indonesia tampaknya merupakan dua hal yang saling terkait satu sama lain. Dari sisi politis agama akan dilihat sebagai sarana dan instrument untuk mencapai maksud dan tujuan politik. Sebaliknya dari sudut dakwah agama, politik akan dilihat sebagai sarana potensial untuk mengembangkan agama. Kaitan erat antara agama dan politik di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan naik turunnya suatu agama di Indonesia yang bukan dikarenakan agama tersebut merupakan pilihan spiritual terbaik tetapi karena raja yang berkuasa memeluk agama tersebut.²⁴

Karena kekuatan primordialitas sangat dominan untuk menunjang proses politik, maka partai politik mayoritas mempunyai basis masanya melalui organisasi massa/organisasi kemasyarakatan bahkan keagamaan. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota

²³ Dikutip dari Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*, hal. 66.

²⁴ Fachry Ali, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, cetakan ke-1 (Jakarta: Pustaka Antara PT, 1984), hal. 2.

masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.²⁵ Pengertian mendasar ini terlihat timpang ketika dibenturkan dengan kenyataan bahwa keberadaan ormas juga seringkali menjadikan friksi bahkan pada level politik. Pada terminologi yang lain, organisasi massa atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, sosial.²⁶ Dari pengertian ini juga, keberadaan ormas yang berada diluar garis partai politik terkesan dipaksakan. Sebab, pada kenyataannya, ormas sangat mempunyai kedekatan kultural bahkan struktural dengan partai politik. Menurut Almond²⁷, kelompok-kelompok dalam masyarakat dapat digolongkan berdasarkan keterikatan dan kelembagaan mengikat di antara penyusunnya yaitu:

1. Kelompok kepentingan, memiliki keanggotaan *loose* (tidak kuat) sehingga dapat bubar setiap saat tergantung dari interest terhadap suatu isu tertentu. Contoh: Komisi Pelayanan Publik,

²⁵ Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa, diakses tanggal 05 Januari 2010.

²⁷ Dikutip dari Ratna Istaniana, www.raconquista.files.wordpress.com/.../analisa-struktural-fungsional-masyarakat.doc, diakses tanggal 05 Januari 2010.

2. Kelompok *anomic*, memiliki keanggotaan sporadik tidak berbentuk dan tidak melembaga, sehingga pembentukannya merupakan reaksi sesaat ketika ada peristiwa kemalangan, keputusan, atau krisis ekonomi dan kelaparan. Contoh: demonstrasi di berbagai daerah karena langkanya beras,
3. Kelompok non-asosiasional, memiliki keanggotaan lebih terorganisir, namun masih jarang memiliki lembaga spesifik dengan sifat keanggotaan masih lepas. Contoh: kelompok keagamaan, majelis taklim, persekutuan gereja, dan lainnya,
4. Kelompok institusional, memiliki sifat keanggotaan lebih erat, digerakan oleh ideology atau visi misi lebih canggih berupa partai politik, maupun korporat bisnis,
5. Kelompok asosiasional, mewakili kelompok-kelompok kepentingan, mewadahi gerakan-gerakan dari kelompok untuk mencapai tujuan asosiasi. Contoh: serikat buruh dan pekerja, serikat kamar dagang Indonesia, dan lainnya,
6. *Civil society*, dimana kelompok masyarakat terjun untuk berinteraksi secara sosial dan politik penuh tanggung jawab tanpa campur tangan politik pemerintah, secara sukarela.

Sejalan dengan pemikiran Almond tentang kelompok kepentingan, para teoritikus komunikasi telah menjembatani kebutuhan analisis dengan memberikan varian pembahasan komunikasi yakni komunikasi politik. Komunikasi politik sebagaimana dalam definisi di atas juga mempunyai

kandungan pesan yang disampaikan kepada komunikan yang dalam terminologi tatanegara disebut sebagai konstituen. Proses komunikasi politik seperti ini menurut Anwar Arifin dilakukan melalui lima metode persuasi, yakni:

a) Persuasi politik

Untuk membentuk opini umum salah satu unsur penting yang ada dalam komunikasi politik adalah persuasi. Persuasi yaitu usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang lain melalui transmisi pesan. Dilihat dari cara operasi dan mediana, persuasi dikategorikan menjadi tiga yakni propaganda, periklanan, dan retorika.²⁸

b) Persuasi propaganda

Propaganda adalah komunikasi yang ditujukan kepada suatu kelompok terorganisasi. Propaganda ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu kelompok yang terdiri atas individu-individu yang dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi.

c) Persuasi politik menggunakan iklan

Perbedaan persuasi politik menggunakan iklan dengan propaganda terletak pada identifikasi pada suatu kelompok. Jika propaganda ditujukan pada individu sebagai anggota kelompok

²⁸ Lihat Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*, hal. 123-140.

persuasi politik melalui iklan adalah persuasi yang ditujukan pada masyarakat sebagai individu tunggal yang independen.

d) Persuasi politik menggunakan retorika

Perbedaan penting antara retorika dengan dua bentuk persuasi yang disebut sebelumnya terletak pada alur aliran pesan. Jika iklan dan propaganda adalah komunikasi satu arah di mana orang yang dipersuasi tidak membalas mempersuasi *persuader* maka retorika adalah komunikasi dua arah. Di mana komunikator dan khalayaknya saling bertukar peran sebagai komunikator dan saling mempersuasi satu sama lain.

Untuk mengkaji opini umum dan persuasi politik, Dan Nimmo menggunakan formula komunikasi dari Harold Lasswell. Formula tersebut dijabarkan dengan dengan menyatakan bahwa dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur yang banyak dikenal yaitu komunikator politik, pesan politik, khalayak politik dan efek politik.²⁹

2. Dakwah sebagai Media Komunikasi

Dakwah berasal dari kata *da'a yad'u da'watan* yang berarti mengajak, memanggil, dan menyeru. Namun, secara terminologis ada banyak definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli. Amrullah Ahmad mendefinisikan dakwah sebagai upaya mengajak manusia supaya masuk ke dalam jalan Allah secara menyeluruh (*kaffah*), baik dengan lisan, tulisan maupun perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan Islam menjadi

²⁹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik*, cetakan ke-1 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003), hal. 27.

kenyataan kehidupan pribadi, *usrah* (kelompok), *jama'ah* dan *ummah*³⁰ Merujuk pada pengertian ini, dakwah mempunyai makna tegas yakni himbauan kepada ummat Islam untuk menjadikan agama Islam sebagai *way of life* baik secara personal maupun kelompok. Makna implisit ini jika dicermati lagi bahwa dakwah pada akhirnya memerlukan dimensi komunikasi untuk menyampaikan pesannya.

Sementara itu, Muhammad Natsir memberikan pengertian dakwah sebagai usaha menyerukan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media dan cara yang diperbolehkan oleh akhlak, dan membimbing pengalamannya dalam perikehidupan perseorangan, berumah-tangga, bermasyarakat, dan bernegara.³¹ Aktifitas dakwah yang pada akhirnya dituntut untuk masuk pada ranah umum (masyarakat/negara) meniscayakan pola yang lebih kontekstual sesuai sosio-kultural masyarakat, oleh sebab itu, penyesuaian terhadap dakwah dalam berbagai hal merupakan tuntutan yang tidak bisa dipungkiri, bahkan termasuk dalam ranah politik. Maka amatlah jelas bahwa jika dilihat dari segi proses, dakwah tiada lain adalah komunikasi ajaran Islam

³⁰ Amrullah Ahmad (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Primadduta, 1993), hal. 2

³¹ Muhammad Natsir, *Fiqhud Da'wah* (Jakarta: Media Dakwah, 2000), hal. 7.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif-analisis yakni menuturkan, menafsirkan dan menganalisa sumber data yang ada.³² Skripsi ini berjenis deskriptif karena penelitian dalam skripsi ini bermaksud memberikan gambaran faktual dan akurat secara sistematis mengenai komunikasi politik yang dilakukan Baitul Muslimin PDI-P DPC Gunung Kidul. Kerja penelitian tentu tidak hanya memberikan gambaran belaka mengenai fenomena-fenomena yang ditelitinya, tapi juga berusaha menerangkan hal-hal yang terkait dengan kenapa atau bagaimana fenomena tersebut muncul. Oleh karena itu setelah memperoleh gambaran baik itu faktor komunikator, proses penyampaian maupun pesan dari komunikasi politik tersebut skripsi ini bermaksud menginterpretasikanya.

Agar pengkajian dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka sebelumnya perlu disusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Penentuan obyek dan subyek penelitian
2. Teknik pengumpulan data
3. Teknik Analisis data
4. Teknik Pemeriksaan keabsahan data

a) Penentuan obyek dan subyek penelitian

Penelitian tentang “Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul” ini mempunyai obyek dan subyek penelitian sebagai berikut:

³² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 132.

1. Obyek penelitian

Objek penelitian dalam Skripsi ini adalah komunikasi politik tentang kepemimpinan perempuan. Lebih spesifik lagi, objek yang dikaji yaitu terkait kerja komunikasi politik Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul yang meliputi; 1). Komunikasi Inter-personal, 2). Sosialisasi Piagam Perempuan, 3). Publikasi Spanduk, 4). Pemberdayaan Perempuan, dan 5) Pengajian Keagamaan.

2. Subyek penelitian

Subjek yang dikaji secara umum adalah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul.

b) Teknik pengumpulan data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Metode *interview*

Adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan orang-orang tertentu dengan bentuk-bentuk pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan.³³ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan.³⁴

2. Metode observasi

³³ Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Aksara, 1987), hal. 113.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 145.

Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Metode ini sangat digunakan agar penyusun mengetahui secara langsung berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Baitul Muslimin DPC-PDI-P Gunung Kidul.

c) Teknik analisis data

Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif yang dipelopori oleh Marshall dan Rossman³⁵, diantaranya:

1. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek (pengurus Baitul Muslimin Gunung Kidul) melalui wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dengan pola pembedaan antara data pokok dengan data penunjang. Data pokok diperoleh dari sumber yang kompeten secara langsung baik personifikasi maupun kelompok. Sementara data penunjang diperoleh dari sumber yang tidak terlibat langsung akan tetapi mengetahui terhadap data yang diperlukan.

2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

³⁵ Dikutip dari Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 162.

3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab I, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

d) Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³⁶ Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi metode atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data dilakukan pengamatan dan wawancara dengan para informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yakni Baitul Muslimin Gunung Kidul. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokuman yang diperoleh.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini selain menggunakan Triangulasi metode juga Triangulasi sumber.

³⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,.....*ibid.*, hal. 170

Triangulasi sumber dilakukan dengan meminta penjelasan berulang kepada informan mengenai informasi yang telah diberikannya untuk mengetahui keajegan atau ketegasan informasinya dalam suatu wawancara tambahan. Selain itu keterangan dari informan lain untuk mengetahui derajat kepercayaan informan tersebut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penyusun sampai pada kesimpulan bahwa dalam komunikasi politiknya PDI Perjuangan menggunakan dakwah sebagai salah satu sarana komunikasi politiknya. Pemanfaatan sarana dakwah ini dilakukan dengan menggabungkan fungsi dakwah yang bertujuan menyebarkan dan mengajak masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam dengan menyelipkan kepentingan politiknya dalam muatan dakwahnya.

Dalam komunikasi politiknya PDI Perjuangan mengkombinasikan beberapa saluran komunikasi politik. Untuk membentuk citra religiusnya sehingga dapat menjangkau suara umat muslim PDI Perjuangan menggunakan simbol-simbol keIslaman melalui Baitul Muslimin.

Pada pemilu presiden 2009, PDI Perjuangan mengajukan perempuan sebagai calon presiden. Dalam masyarakat dimana masih terdapat pemikiran yang mentabukan perempuan menjadi presiden membuat PDI Perjuangan berkepentingan untuk mensejajarkan posisi perempuan dan laki-laki di mata masyarakat dalam pemberian kesempatan menjadi pemimpin. Kepentingan tersebut terformulasikan dalam komunikasi politik PDI Perjuangan ketika menggunakan sarana dakwah.

Dalam dakwah politisnya tersebut PDI Perjuangan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat sebagai manusia yang layak

mendapatkan kesempatan memimpin. Pada konten dakwahnya PDI Perjuangan menyisipkan pandangan bahwa Islam melegalkan perempuan memegang tampuk kepemimpinan disegala level termasuk kepemimpinan sebuah negara. Penentu apakah seseorang dapat menjadi pemimpin atau tidak bukanlah jenis kelaminnya melainkan kemampuannya.

Melalui formula komunikasi politik bernuansa dakwah yang menyuguhkan pandangan positif tentang presiden perempuan inilah PDI Perjuangan berupaya memobilisasi masyarakat untuk memberikan suaranya pada Megawati sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Beberapa fungsi partai politik yang lain seperti agregasi politik, integrasi dalam sistem politik dan sosialisasi politik juga dilakukan melalui formulasi dakwah politis Bamusi ini.

B. Saran

Dalam komunikasi politiknya yang bertujuan salah satunya untuk memobilisasi masyarakat agar memberikan suaranya pada Megawati sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, PDI Perjuangan telah mengambil posisi sebagai organisasi feminis dalam arti organisasi yang mendukung perjuangan hak perempuan. Alangkah baiknya jika komitmen untuk memperjuangkan hak perempuan ini diterapkan secara konsisten dan kontekstual.

Konsisten dalam arti perjuangan untuk memperjuangkan keadilan gender tidak semata-mata untuk memuluskan pencalonan Megawati saja, namun juga berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan keadilan bagi

seluruh perempuan. Jangan sampai setelah perhelatan pemilu selesai maka selesai juga suara Baitul Muslimin dan PDI Perjuangan dalam mengangkat derajat perempuan agar setara dengan rekannya laki-laki sebagai manusia. Selain itu perhatian pada keadilan gender diharapkan tidak sebatas mengenai masalah kepemimpinan saja namun juga problematika perempuan yang lain.

Kontekstual dalam arti bahwa dalam memperjuangkan keadilan gender, PDI Perjuangan bersama Bamusinya mestilah memperhatikan situasi dan kondisi perempuan dan masyarakat dimana perjuangan itu dilakukan. Penerapan program yang kontekstual ini akan membuat perjuangan BAMUSI lebih dapat diterima dan sesuai sasaran.

Selain itu dakwah Islamiah yang dilakukan Baitul Muslimin mesti juga melandasi semangat politik PDI Perjuangan sebagai partai yang menaunginya. Kebijakan politik yang diambil sekaligus tindak tanduk para pemimpin partai dan anggotanya seyogyanya mencerminkan nilai-nilai keIslaman. Dengan menjaga idealisme Islam yang nasionalis ini maka Islam yang diusung PDI Perjuangan dan Bamusi tidak jatuh menjadi Islam simbol semata.

C. Penutup

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Baitul Muslimin Gunung Kidul dan PDI Perjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, segala kritik dan saran membangun akan dengan senang hati diterima demi perbaikan kualitas skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kategori Buku

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga periode 2007-2012*, Baitul Muslimin Indonesia, Yogyakarta, Pengurus Baitul Muslimin Indonesia, 2008
- Anwar Arifin, *Komunikasi Politik, cetakan ke-1*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003
- Amrullah Ahmad (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Primadduta, 1993
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Paramadina, 1998
- Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3*, Penerbit Wahana Media; Yogyakarta 1996
- Dan Nimmo, *Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media*, penerjemah Tjun Surjaman, Cetakan ke-2 Bandung: Goodyear Publishing Co. bekerjasama dengan Remaja Rosdakarya , 1993
- Dale F.Eikelman dan James Piscatori, *Politik Muslim: Wacana Kekuasaan dan Hegemoni dalam Masyarakat Muslim*, penerjemah Endi Haryono dan Rahmi Yunita, cetakan ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998
- Fachry Ali, *Islam, Pancasila dan Pergulatan Politik*, cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka Antara PT, 1984
- Faisal Ismail dalam kata pengantar Hamdan Daulay, *Dakwah di Tengah Persoalan Budaya dan Politik*, cetakan ke-1, Yogyakarta: LESFI, 2001
- Ghazala Anwar, *Wacana Teologi Feminis*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Jaringan Nasional Perempuan Mahardika, *Modul Sekolah Feminis*, Yogyakarta: JNPM, 2008
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Aksara, 1987
- Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1999
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004

- Muhammad Natsir, *Fiqhud Da'wah*, Jakarta: Media Dakwah, 2000
- Onong Uchjana E, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1984
- Sumarno AP, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Bandung*; Citra Aditya Bakti, 1993
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi*, edisi ke-10, terj. Benyamin Molan Jakarta : PT. Indeks, 2003
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Fakultas Psikologi UGM, 1987
- Tim Penyusun Buku SKI Fakultas Adab UIN Yogyakarta, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka, 2006
- Tabloid Suara Islam, *Poros Islam Suatu Keniscayaan*, edisi 49, Tanggal 1 - 14 Agustus 2008.
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Yongki Karman, "Sekitar Sila Pertama Pancasila". Karniawan Zein dan Syarifuddin HA (ed), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Yusuf al- Qaradhawi, *Qaradhawi Bicara Soal Wanita*, cet-1, penerjemah: Tiar Anwar Bachtiar, Bandung: Arasy, 2003

B. Homepage dan Perundangan

Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa, diakses tanggal 05 Januari 2010.

<http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/blogcategory/36/74>. diakses 22 Mei 2009.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>. diakses tanggal 10 Oktober 2009

<http://www.pdi-perjuangan.or.id/content/blogcategory/36/74>. diakses 22 Mei 2009.

www.raconquista.files.wordpress.com/.../analisa-struktural-fungsional-masyarakat.doc, diakses tanggal 05 Januari 2010.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 3263

Membaca Surat : Dekan Fakultas Dakwan UIN "SUKA" Nomor : UIN/2/PD.I/TL.01/836/2009
Yogyakarta Perihal : Ijin Penelitian
Tanggal Surat : 15 Juni 2009.
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di ijinkan kepada :

N a m a : LIDIASTUTI GULO NIM : 04210058

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : Komunikasi Politik Dalam Dakwah Organisasi Masyarakat Baitul Muslimin DPC PDIP Gunungkidul

L o k a s i : Kabupaten Gunungkidul

Waktu : Mulai Tanggal, 18 Juni s/d 18 September 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)* , dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Bupati Gunungkidul cq. KPPTSP
3. Ka. Kanwil Depag Provinsi DIY
4. KPU Provinsi DIY
5. Dekan Fakultas Dakwan UIN "SUKA" Yogyakarta
6. Yang Bersangkutan.



**DEWAN PENGURUS CABANG
BAITUL MUSLIMN INDONESIA
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**



**SURAT KETERANGAN
Nomor:012/Bamusi GK/VI/2010**

Merujuk surat dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Nomor: UIN/2/PD.I/TL.01/836/2009 tentang izin penelitian skripsi, maka pengurus Baitul Muslimin DPC PDI Gunungkidul menerangkan bahwa:

Nama : Lidiastuti Gulo
NIM : 04210058
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Telah mengadakan penelitian di lembaga kami untuk skripsi berjudul **Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul** terhitung dari 18 Juni sampai tanggal 18 September 2009.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 19 Juni 2010

Pengurus Cabang Bamusi
DPC PDI Gunungkidul



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LIDIASTUTI GULO**

Tempat, tgl/lahir : Sleman, 20 Oktober 1983

N I M : 04210058

Fak/Jur : Dakwah/Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Komunikasi Politik Tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Dakwah Baitul Muslimin DPC PDI-P Gunung Kidul**, merupakan hasil karya penelitian penyusun serta bukan bentuk plagiasi maupun saduran dari karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bukti adanya unsur pelanggaran di atas, penyusun bersedia menerima konsekuensi sesuai yang diberlakukan oleh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya,

Sleman, 20 Juli 2010.

Penyusun,



LIDIASTUTI GULO
NIM. 04210058

Curriculum vitae

Nama Lengkap : Lidiastuti Gulo

Tempat Tgl. Lahir : 20 Oktober 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Menikah

Email : lia_gulo@yahoo.co.id

Nama Orang Tua :

1. Bapak : Elinudin Gulo
2. Ibu : Sri Mulyani

Alamat Rumah : Wuluh 18 Papringan Catur tunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55281

Pendidikan

1. SD BOBKRI Demangan III Lulus Tahun 1996
2. SLTPN I Depok Yogyakarta Lulus Tahun 1999
3. SMUN I Depok Yogyakarta Lulus Tahun 2003